



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	:	2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	:	IV (Empat).
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja.
Dengan	:	Menteri Pariwisata RI.
Hari/Tanggal	:	Rabu, 25 April 2018.
Pukul	:	10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017;2. Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018;3. Devisa Pariwisata;4. Evaluasi Strategi Pemasaran Pariwisata dan Kunjungan Wisatawan;5. Hasil Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap 169 Negara; dan6. Lain-lain.
Hadir	:	33 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	:	Arief Yahya/Menteri Pariwisata RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.50 WIB oleh DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpar RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Kementerian Pariwisata RI menyampaikan beberapa hal antara lain:

1. **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017. Kemenpar melakukan langkah-langkah sbb:**

- 1) Penerapan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - 2) Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada masing masing Satuan Kerja sehingga Tim TPKN yang sudah dibentuk akan disesuaikan.
 - 3) Pendampingan pada Setiap Satker dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - 4) Mengembangkan Sistem Manajemen Pengawasan Terintegrasi (Simpati) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut.
 - 5) Memfasilitasi pertemuan antara Satker dengan BPK RI untuk penyelesaian tindak lanjut validasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban.
2. **Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018**
Realisasi penyerapan APBN TA 2018 sampai dengan 23 April 2018 adalah sebesar Rp205.436.985.917,- (dua ratus lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau sebesar 5,5% dari APBN TA 2018.
3. **Devisa Pariwisata**
Perolehan devisa sektor pariwisata menunjukkan tren positif dan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tahun 2015 perolehan devisa adalah sebesar US\$ **12.225.892.155** (dua belas miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh lima US dollar). Tahun 2016 nilai devisa sektor pariwisata diperkirakan sekitar 12 sampai 13 miliar US dollar.
4. **Evaluasi Strategi Pemasaran Pariwisata dan Kunjungan Wisatawan**
- 1) Dalam era digital, pendekatan pemasaran pariwisata tidak hanya mengandalkan *hight tech* tetapi juga memberikan sentuhan humanis dalam konten (*high touch*).
 - 2) Strategi promosi bersinergi dengan pelaku usaha dalam memfasilitasi pembuatan materi promosi yang berisi paket wisata dari industri.
 - 3) Kunjungan wisman ke Indonesia menunjukkan tren positif dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah wisman adalah 14.039.799 kunjungan.
 - 4) Hal yang cukup krusial dalam upaya mendukung pencapaian target kunjungan wisman pada tahun 2018 adalah peningkatan konektivitas udara dari negara originasi wisatawan. Pada tahun 2018 dibutuhkan 25,5 juta *International Flight Seats*.

5. **Hasil Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap 169 Negara**
 - 1) Evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Evaluasi dilakukan dengan perbandingan periode waktu sebelum dan sesudah BVK diberlakukan. Dengan menggunakan periode waktu 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan BVK, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata sebesar **19,43%** atau berkisar antara **11,9% - 53,35%**.
 - 2) Negara BVK yang kenaikan kunjungannya tertinggi adalah: Mesir (53,35%), Bahrain (41,63%), India (28,78%), Inggris (27,56%), Arab Saudi (26,91%). Namun berdasarkan data imigrasi periode Januari-Agustus 2017 terdapat 49 negara BVK yang jumlah kunjungannya kurang dari 150 wisman. Sehingga direkomendasikan untuk ditinjau ulang dan diberlakukan *Visa on Arrival* (VOA)

6. **Perkembangan Kepariwisata Indonesia**
 - 1) *Branding wonderful* Indonesia mendapatkan 29 penghargaan di 8 negara di awal tahun 2018.
 - 2) Indonesia berhasil naik 1 (satu) peringkat menjadi peringkat 2 (dua) dalam *Global Muslim Travel Index 2018* (GMTI).
 - 3) Indonesia berhasil meraih 3 penghargaan pada acara *Global Destination Marketing Summit and World Culture and Tourism Forum 2018*.
 - 4) Kunjungan wisman periode Januari s.d. Februari 2018 berjumlah 2.301.736 kunjungan.

B. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI adalah sbb:

1. Terhadap ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2017, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar agar meningkatkan tertib laporan dan tata kelola keuangan sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan yang berlaku agar temuan dari sisi SPI, kepatuhan terhadap UU, potensi kerugian negara dari tahun ke tahun semakin menurun, dan tidak terulangnya permasalahan yang sama pada tahun berikutnya.
2. Terhadap daya serap APBN TA 2018 baru mencapai 5,5% pada kuartal I, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI untuk mempercepat pelaksanaan kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi.
3. Dalam rangka mencapai target wisman dan penerimaan devisa pariwisata tahun 2019, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI agar melakukan evaluasi strategi pemasaran pariwisata yang dapat lebih meningkatkan dukungan dan komitmen, serta adanya peningkatan pemahaman yang sama bagi para pemangku kepentingan bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan yang dapat menjadi sumber utama penghasil devisa negara. Karenanya, perlu sinergitas antar K/L, dan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

4. Terkait dengan implementasi strategi pemasaran pariwisata, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI agar meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan kepariwisataan. Misalnya strategi pengembangan kepariwisataan Indonesia yang perlu ditingkatkan antara lain program/kegiatan sadar wisata, 10 pemasaran pariwisata prioritas, destinasi wisata Batam, *event* Asian Games 2018, pertemuan tahunan IMF 2018 di Bali, Taman Mini Indonesia Indah, dsbnya.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI untuk membuat terobosan implementasi BAS agar destinasi wisata Indonesia meningkat dari dikenal menjadi diingat, dan kemudian menjadi prioritas utama kunjungan wisata dunia.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI untuk melakukan langkah strategis yang memungkinkan terwujudnya penerbangan langsung (*direct flight*) dari Indonesia ke Uzbekistan dan sebaliknya dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan dari Asia Tengah.
7. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI untuk melakukan langkah strategis yang memungkinkan terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan dari Timur Tengah.
8. Terhadap hasil evaluasi pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menunjukkan adanya 49 negara yang kenaikan nominal kunjungannya terendah dengan jumlah kunjungan kurang dari 150 wisman, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar agar BVK terhadap 49 negara tersebut ditinjau ulang.
9. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemenpar RI atas *branding wonderful* Indonesia mendapatkan 29 penghargaan di 8 negara pada awal tahun 2018, kenaikan peringkat GMTI 2018, penghargaan *Global Destination Marketing Summit and World Culture and Tourism Forum* 2018, dan penerimaan devisa pariwisata kedua setelah devisa CPO untuk tahun 2017.
10. Komisi X DPR RI meminta Kemenpar RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lambat pada tanggal 9 Mei 2018 terhadap poin II.B.1 s.d. 8 dan seluruh tanggapan/masukan/pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.55 WIB

MENTERI PARIWISATA RI



ARIEF YAHYA

KETUA RAPAT,



DR. IR. DJOKO UDJIANTO, M.M. f